

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dwi Septi Haryani¹

¹Jurusan Manajemen STIE Pembangunan Tanjungpinang
Jln. RH. Fisabilillah No. 34 Tanjungpinang Kepulauan Riau Indonesia

¹dwiseptih@stie-pembangunan.ac.id

Intisari— Seluruh Instansi Pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja disetiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan salah satu program dalam rangka Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu melalui jurnal, buku, artikel maupun wawancara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengimplementasian SAKIP pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan kemudahan dalam pembuatan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja yang telah dijalankan, serta dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Kata kunci— Evaluasi, SAKIP, SIM, Implementasi.

Abstract— All Government Agencies have to arrange the Performance Report every year. That is a form of the affirmation of the Performance Accountability has been done by the application of accountability system of the government agency performance (SAKIP). SAKIP is one of program to Bureaucrat Reformation. For knowing how far the government instances to implement the SAKIP and also to support that there is the raising of government performance, so it is important to do the evaluation of Implementation of SAKIP. This research is for knowing how the evaluation of the implementation of accountability system of the government agency performance (SAKIP) at Law Government Office, Kepri Province. The method of this research uses literature study by journal, book, article and also interview the resource directly. The result of the research is to show that SAKIP has a function to make easier in monitoring and making working plan, reporting and evaluating the performance. SAKIP is done by Law Government Office, Kepri Province has done as the expectation. So, it can help the Government to create the region development.

Keywords— Evaluation, SAKIP, SIM, Implementation.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999. Inpres tersebut mengamanatkan dilaksanakannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di semua level instansi pemerintahan. (Sofyani & Akbar, 2013).

Seluruh Instansi Pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja disetiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan salah satu program dalam rangka Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, mengenai “Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Hukum Pemprov Kepri “, Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya melalui Jurnal- Jurnal sebagai pembandingan dan acuan untuk membuat. Selain dari Jurnal ada juga mengambil bahan penelitian dari sejumlah buku dan internet.

Sistem Informasi adalah sistem dalam organisasi yang menggabungkan pengolahan transaksi harian yang support terhadap fungsi operasi yang memiliki sifat manajerial dengan kegiatan strategis untuk menyediakan kepada pihak tertentu laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005:40).

Menurut PP Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi adalah pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta

untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerjadengan ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000).

Teori manajemen berpendapat bahwa evaluasi kinerja berfokus pada penilaian secara faktor *human capital* menjadi sangat penting sebagai faktor yang mempelajari perilaku karyawan dan kinerjanya (Suwatno & Priansa, 2016:215). Menurut Rivai (2009), Penilaian kinerja adalah sistem formal dan tertata yang dipakai guna mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat absensi (Suwatno & Priansa, 2016:196). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Metode penelitian data dilakukan dengan studi literatur yaitu melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas juga melalui artikel-artikel dari buku dan internet serta mewawancarai langsung kepada narasumber. Subjek Penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Biro Hukum di Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi penelitian ini dilakukan di kediaman narasumber. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Handphone sebagai alat perekam, flashdisk sebagai alat penyimpanan data dan laptop sebagai tempat untuk mengerjakan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder dimana sumber data yang langsung dan tidak langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:376). Menurut Bogdan, teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2014:401).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana fungsinya untuk mempermudah proses pemantauan (*monitoring*) dan pembuatan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah daerah baik itu kabupaten Kota, Provinsi dan juga Kementerian dan Lembaga, baik Departemen maupun non Departemen Sehingga dapat membantu Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah Indikator-indikator kerja utama yang dimasukkan kedalam SAKIP akan di nilai oleh MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) dan RB (Reformasi Birokrasi).

Nilai SAKIP ini sangat berarti bagi daerah-daerah terutama daerah kabupaten Kota atau Provinsi. Jika nilai yang diperoleh oleh daerah tersebut bagus maka akan mendapatkan point atau reward dari MENPAN dan RB terkait dalam hal mewujudkan pembangunan Daerah. Jika nilai yang di peroleh dari setiap daerah buruk kemungkinan tidak akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat tetapi akan tetap di pantau oleh pemerintah.

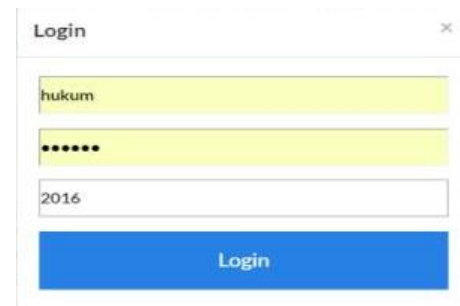
Untuk masuk kedalam menu utama SAKIP, maka terlebih dahulu dimulai dengan membuka [link http://e-sakip.inspektorat.kepriprov.go.id](http://e-sakip.inspektorat.kepriprov.go.id). Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 1.

Pada gambar utama dijelaskan tentang fungsi dari Sistem Aplikasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu terdapat juga akses publik yakni suatu proses Transparansi atau keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Transparansi Pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi. Kemudian terdapat juga Kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat.



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi SAKIP

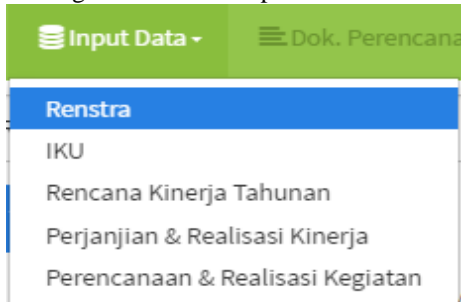
Selanjutnya untuk mengisi (*entry*) laporan dan rencana yang akan dibuat, terlebih dahulu harus Login dengan menggunakan nama pengguna, password dan tahun. Untuk nama pengguna diisi unit kerja (satuan kerja perangkat daerah yang biasa disingkat dengan SKPD), karena peneliti melakukan penelitian di SKPD Biro Hukum maka nama pengguna adalah hukum seperti yang terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Login SAKIP

Setelah login, maka akan muncul beberapa menu, tetapi karena yang digunakan diunitkerja Biro Hukum ini penginputan data, maka kita pilih menu Input Data (gambar 3) terdiri dari Rentsra, IKU, Rencana Kinerja Utama, Perjanjian & Realisasi Kinerja, Perencanaan & Realisasi Kegiatan. Kemudian pilih menu input dan klik menu renstra (rencana strategis). Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sehingga Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang

realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai (Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999). Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 3. Tampilan Menu Input (Renstra)

Setelah melakukan pemilihan menu renstra pada input data maka akan muncul tampilan seperti gambar 4 Pada gambar jelas terlihat terdapat menu tahun yang berfungsi untuk melihat penginputan renstra tahun berapa sampai dengan tahun keberapa dan juga terdapat menu unit kerja. Untuk menambah renstra baru, maka klik menu tambah sedangkan untuk menampilkan hasil maka klik menu tampilkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 5.



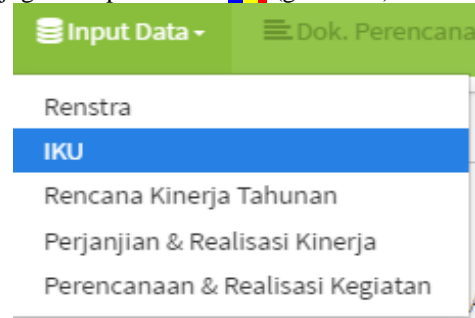
Gambar 4. Tampilan Menu untuk Input Data Renstra



Gambar 5. Tampilan Output (Renstra)

Pada tampilan output dari RENSTRA., terdapat bottom untuk mengedit renstra yang sudah dibuat. Kemudian lakukan hal yang sama pada menu putan berikutnya, lalu pilih IKU (Indikator Kinerja Utama). IKU berfungsi sebagai kinerja yang menjadi faktor utama yang di kerjakan oleh biro hukum. Setelah melakukan pemilihan menu IKU pada input data maka akan muncul tampilan seperti gambar 6. Setelah memilih menu IKU maka akan muncul menu seperti gambar 7 Pada gambar jelas terlihat terdapat menu yang berisikan

unit kerja mana yang harus kita isi. Selain itu terdapat juga menu tampilkan dan tambah, sama hal nya dengan pengisian renstra. Hanya bedanya di IKU tidak terdapat tahun. Setelah kita memasukkan unit kerja, untuk melihat hasil yang sudah kita input maka klik tampil ntuk menampilkan hasilnya. Pada hasil ini juga terdapat bottom (gambar 8).



Gambar 6. Tampilan Menu Input (IKU)

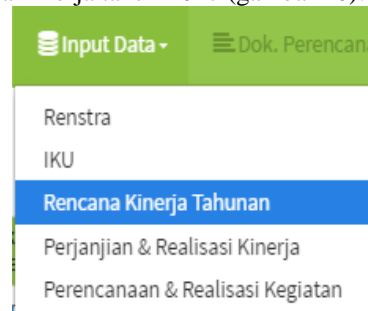


Gambar 7. Tampilan Input IKU



Gambar 8. Tampilan Output (IKU)

Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti menu sebelumnya yakni memilih menu yang akan kita input datanya. Pilih menu Rencana Kinerja Tahunan (gambar 9). Rencana Kinerja Tahunan berfungsi untuk merencanakan kegiatan tahun berikutnya. Jika tahun yang sedang berjalan 2016, maka yang kita input di Rencana Kinerja Tahunan adalah rencana kinerja tahun 2017 (gambar 10).



Gambar 9. Tampilan Menu Input (RKT)

Gambar 10. Tampilan Input RKT

Untuk menampilkan hasil dari rencana kinerja yang telah kita buat, maka klik menu tampilkan, maka akan muncul tampilan seperti gambar 11 Pada tampilan ini juga terdapat bottom untuk mengedit RKT yang sudah dibuat.

Gambar 11. Tampilan Output RKT

Pada menu berikutnya, cara penginputannya sama dengan menu-menu sebelumnya yang sudah dikerjakan, Pilih menu Perjanjian dan Realisasi Kinerja dan Inputan Data (gambar 12) Lalu akan muncul tampilan seperti gambar 13. Pada tampilan ini terdapat menu tahun dan unit kerja. Tahun yang dimaksud pada menu ini adalah tahun yang sedang berjalan. Untuk menampilkan hasil pilih menu tampil, maka akan muncul seperti gambar 14.

Gambar 12. Tampilan Menu Input (PRK)

Gambar 13. Tampilan Input Perjanjian & Realisasi Kegiatan

Gambar 14. Tampilan Output Perjanjian & Realisasi Kegiatan

Menu terakhir pada Inputan data adalah Perencanaan & Realisasi Kegiatan (gambar 15) pilih Perencanaan dan Realisasi Kegiatan akan akan tampil seperti gambar 16. Lalu isi tahun yang akan diinput, (tahun berjalan) dan isi unit kerja yang akan dipilih dalam penelitian ini semua unit kerja yg diisi pada menu unit kerja adalah Biro Hukum. Setelah semua diisi maka kita pilih menu tampil untuk menampilkan hasil yang telah diinput (gambar 17).

Gambar 15. Tampilan Menu Input (Perencanaan & Realisasi Kegiatan)

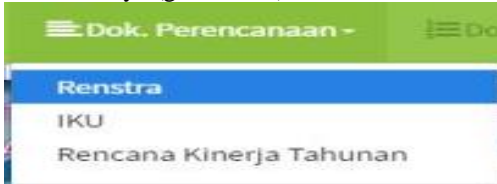
Gambar 16. Tampilan Input Perencanaan & Realisasi Kegiatan

Tampilan ini output dari perencanaan dan realisasi kegiatan. Pada tampilan ini juga terdapat bottom .

Gambar 17. Tampilan Output Perencanaan & Realisasi Kegiatan

Pada input data, semua hasil dari item yang diisi akan terdapat bottom . Dimana bottom tersebut digunakan untuk mengedit hasil data yang kita isi.

Berikut adalah tampilan dari hasil penginputan data di menu Input Data sebelumnya. Dimana hasilnya disini adalah *final* dan sudah tidak bisa diedit lagi. Menu utama yang kita pilih adalah Dok. Perencanaan (Dok : Dokumen). Pada menu ini itemnya sama dengan yang terdapat di menu Input Data yaitu Renstra, IKU, Rencana Kinerja Utama, Perjanjian & Realisasi Kinerja, Perencanaan & Realisasi Kegiatan. Jika ingin melihat hasil dari renstra, maka kita pilih pada menu Dok. Perencanaannya (gambar 18).




Gambar 18. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (Renstra)

Setelah dipilih renstra nya maka akan muncul seperti gambar 19. Tampilan hampir sama dengan tampilan renstra pada menu input data, bedanya disini adalah tidak terdapat menu tambah.



Gambar 19. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan

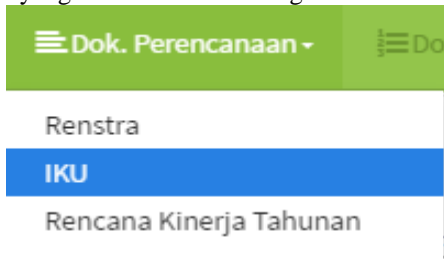
Hasil tampilan dari Dokumen Perencanaan untuk Renstra di Biro Hukum (gambar 20). Pada hasil ini, sudah tidak terdapat lagi bottom .

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN: 2016 SD 2021
UNIT KERJA: BIRO HUKUM

NO	TITIK	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RENCANA KINERJA TAHUNAN	TARGET					REVISI	
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Sebagai pimpinan dan penanggung jawab	1. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	1. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12	12	12	12	12	12	12
2.	Sebagai pimpinan dan penanggung jawab	2. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	2. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12	12	12	12	12	12	12
3.	Sebagai pimpinan dan penanggung jawab	3. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	3. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12	12	12	12	12	12	12
4.	Sebagai pimpinan dan penanggung jawab	4. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	4. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12	12	12	12	12	12	12

Gambar 20. Tampilan Output Dokumen Perencanaan (Renstra)

Jika kita ingin melihat hasil dari item-item lain yang terdapat di Dok. Perencanaan, maka tinggal dipilih saja pada menu. Cara yang dilakukan sama dengan menu sebelumnya.



Gambar 21. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (IKU) Input sesuai dengan unit kerja yang ada.



Gambar 22. Tampilan Input untuk Memilih Hasil dari Unit Kerja

Hasil tampilan dari Dokumen Perencanaan untuk IKU pada biro hukum.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO HUKUM

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RENCANA KINERJA TAHUNAN	REVISI
1.	1. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	1. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12
2.	2. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	2. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12
3.	3. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	3. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12
4.	4. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	4. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan	12

Gambar 23. Tampilan Output Dokumen Perencanaan (IKU)

Pada menu dokumen perencanaan ini pilih menu Rencana Kinerja Tahunan dan pada menu ini sama dengan menu yang sebelumnya yaitu hanya dapat melihat hasil dari penginputan yang sudah final dan tidak bisa di ubah lagi.



Gambar 24. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (RKT)

Input sesuai dengan unit kerja dan isi tahun kedepannya yaitu diatas satu tahun pada tahun berjalan.



Gambar 25. Tampilan Input untuk Dokumen Perencanaan (RKT)

Hasil tampilan dari Dokumen Perencanaan untuk IKU pada biro hukum.

Gambar 26. Tampilan Output Dokumen Perencanaan (RKT)

Setelah semua data terinput dan tidak ada lagi perubahan, maka Inspektorat akan memantau dan memeriksa SKPD mana saja yang belum menginput data. Pemantauan/monitoring dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun rencana berikutnya (Taufik, 2013).

B. EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PADA BIRO HUKUM

Setiap sistem yang telah dilaksanakan perlu dinilai atau dievaluasi unjuk kerjanya untuk melihat sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan sasaran awal yang ditetapkan. Periode evaluasi tergantung dari kebutuhan dan kebijakan manajemen (Falahah & Rijayana, 2011).

Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi SAKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 27. Siklus Manajemen Kinerja

Dari penelitian yang dievaluasi terdapat kekurangan dari Implementasi SAKIP pada Biro Hukum :

1. SAKIP tidak bisa difungsikan tanpa menggunakan jaringan
2. Untuk login ke menu SAKIP hanya bisa menggunakan nama unit kerja

Kelebihan dari Implementasi SAKIP :

1. SAKIP memberikan kemudahan bagi Biro Hukum menginput data dalam pembuatan laporan.
2. Mengefisiensikan waktu kerja.
3. Menudahkan proses pemantauan dan pengendalian kerja terhadap Biro Hukum
4. Tampilan utama dari SAKIP sudah baik, karena terdapat kontak pelayanan public
5. Tampilan menu SAKIP sudah terstruktur, sehingga mempermudah proses kinerja.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, SAKIP memberikan kontribusi besar dalam menjalankan sistem kerja didalam birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya SAKIP dapat mempermudah pemantauan kinerja dari setiap unit kerja yang ada di daerah.
2. Hasil penelitian dari evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dijalankan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan pejabat pemerintah dalam menjalankan SAKIP di wilayah pemerintahannya
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang akan membahas permasalahan yang sama terkait dengan SAKIP002E

Secara keseluruhan evaluasi mencantumkan laporan kinerja individu yang bisa mempengaruhi fungsi tim dan juga kinerja tim secara keseluruhan (M.S., 2014).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu, membimbing penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Adapun pihak-pihak yang turut membantu diantaranya:

1. Untuk objek penelitian Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dengan memberikan informasi yang sangat berguna dan terima kasih atas ketersediaannya dalam proses pengambilan data, wawancara, hingga dokumentasinya.
2. Untuk teman seperjuangan Pak Satriadi, S.AP., M.Sc., terimakasih atas bantuan, nasehat dan semangat serta kerja sama yang telah diberikan.

REFERENSI

Falahah, & Rijayana, I. (2011). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DENGAN PENDEKATAN UTILITY SYSTEM (STUDI KASUS SISTEM E-CAMPUS UNIVERSITAS WIDYATAMA). *Jurnal Ilmiah KURSOR*, 6(2), 83–92.

M.S., S. (2014). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>

- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). HUBUNGAN FAKTOR INTERNAL INSTITUSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184–205. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2013.10>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2016). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, T. (2013). PERAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–212.